

Konsep *Collaborative Governance* Dalam Bingkai Budaya Gotong Royong di Indonesia

Aswin Palls¹

Email: aswin.palls@unpas.ac.id

Abstrak

Budaya gotong royong ini sebenarnya bukan hal baru dalam peradaban masyarakat Indonesia. Hakikatnya manusia merupakan makhluk sosial yang tidak biasa hidup sendiri namun membutuhkan pertolongan manusia lain. Oleh sebab itu di dalam kehidupan masyarakat diperlukan adanya kerjasama dan sikap gotong royong dalam menyelesaikan segala permasalahan. Ketika gotong royong menjadi penciri dari Kearifan Lokal bangsa Indonesia yang menunjukkan kohesi sosial dalam solidaritas sosial dan interaksi sosial ini merupakan sebuah modal sosial bangsa Indonesia. *Collaborative Governance* sebagai suatu terobosan dalam tata kelola pemerintahan menjadi solusi karena keterlibatan berbagai pihak didalamnya. Yang perlu di garis bawahi bahwa budaya gotong royong di Indonesia merupakan modal dasar dari pada pelaksanaan konsep *Collaborative Governance*. Gotong royong yang menjadi kebiasaan sehingga membudaya di masyarakat Indonesia tentunya menjadi faktor pendukung bagi pemerintah dalam melaksanakan konsep *collaborative governance*.

Kata Kunci: *Collaborative Governance, Gotong Royong*

Abstract

Gotong royong culture is actually not a new thing in the civilization of Indonesian society. In essence, humans are social creatures who are not used to living alone but need the help of other humans. Therefore, in people's lives, cooperation and mutual cooperation are needed in solving all problems. When gotong royong is the hallmark of the Indonesian Local Wisdom, which shows social cohesion in social solidarity and social interaction, this is a social capital for the Indonesian people. Collaborative Governance as a breakthrough in governance is a solution because of the involvement of various parties in it. What needs to be underlined is that the culture of gotong royong in Indonesia is the basic capital of implementing the concept of Collaborative Governance. Gotong royong which has become a habit so that it is entrenched in Indonesian society is certainly a supporting factor for the government in implementing the concept of collaborative governance.

Keywords: *Collaborative Governance, Gotong Royong*

Pendahuluan

Indonesia merupakan negara yang memiliki banyak sekali budaya yang beragam dikenal dengan akan heterogensinya, Indonesia memiliki karakteristik dan corak budaya di setiap daerahnya. Budaya yang berbeda bukan menjadi alasan untuk Indonesia menjadi

¹ Universitas Pasundan

bagian kecil dan terpecah belah, perbedaan budaya yang kontras setiap di daerah diikat oleh semboyan negara Indoneisa yaitu *Bhineka Tunggal Ika*. Semboyan yang berasal dari sebuah kakawin Jawa Kuno yaitu kakawin Sutasoma, karangan Mpu Tantular semasa kerajaan Majapahit sekitar abad ke-14, di bawah pemerintahan Raja Rajasanagara, yang juga dikenal sebagai Hayam Wuruk. Secara harfiah *Bhinneka Tunggal Ika* diterjemahkan "Beraneka Satu Itu", yang bermakna meskipun beranekaragam tetapi pada hakikatnya bangsa Indonesia tetap adalah satu kesatuan. Semboyan ini digunakan untuk menggambarkan persatuan dan kesatuan Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri atas beraneka ragam budaya, bahasa daerah, ras, suku bangsa, agama dan kepercayaan.

Indonesia selain dikenal dengan keragaman budaya, di kancah internasional dikenal juga akan keramahan, kekeluargaan dan sikap gotong royong. Tentunya pandangan umum terkait Indonesia identik dengan keeratannya tidak terlepas dari semboyan yang tertanam dalam kehidupan bernegara. Gotong royong menjadi salah satu ciri khas yang dimiliki didasari dengan rasa kebersamaan yang tinggi. Kartodijo (1987) "Gotong royong merupakan budaya yang telah tumbuh dan berkembang dalam kehidupan sosial masyarakat Indonesia sebagai warisan budaya yang telah eksis secara turun-temurun".

Budaya gotong royong begitu membawa angin positif yang tumbuh dan berkembang ditengah kehidupan masyarakat Indonesia. Kiprah budaya gotong royong begitu besar dampaknya bagi setiap termin pelaksanaan kegiatan bernegara, secara empiris di Indonesia proses pencapaian kemerdekaan tidak terlepas dari semangat gotong royong untuk meraih kemerdekaan. Gotong royong yang turun temurun dan terus berkembang memberikan perubahan signifikan ke arah yang lebih baik dari tingkat masyarakat desa hingga para negarawan yang terlibat dalam pembangunan bangsa.

Dewasa ini hadir banyak konsep yang berkaitan dalam proses tata kelola pemerintahan dalam rangka pembangunan sebuah negara. Pada perspektif administrasi publik salah satunya dikenal dengan konsep *Collaborative Governance*. Menurut Anshell and Gash (2007) dalam Subarsono (2016) menjelaskan bahwa *Collaborative Governance* merupakan serangkaian pengaturan dimana satu atau lebih lembaga publik yang melibatkan

secara langsung *stakeholders non state* di dalam proses pembuatan kebijakan yang bersifat formal, berorientasi konsensus dan deliberatif yang bertujuan untuk membuat atau mengimplementasikan kebijakan publik atau mengatur program publik atau aset. Sudah seharusnya pemetintah melakukan *collaborative governance* karena yang dituntut adalah bagaimana organisasi pemerintahan hadir tidak sekedar untuk mengikuti tugas-tugas rutin, namun bagaimana ia mengkreasikan nilai bagi masyarakat atau bangsa-bansa tempatnya berada. Seperti yang dikatakan oleh Balogh dkk dalam Subarsono (2016: 176) mendefenisikan *collaborative governance* merupakan “sebuah proses dan struktur dalam manajemen dan perumusan keputusan kebijakan publik yang melibatkan aktor-aktor yang secara konstruktif berasal dari berbagai level, baik dalam tatanan pemerintahan dan atau instansi publik, instansi swasta, dan masyarakat sipil dalam rangka mencapai tujuan publik yang tidak dapat dicapai apabila dilaksanakan oleh satu pihak saja”.

Perlu dipahami bahwa konsep gotong royong yang membudaya serta tumbuh dan berkembang di ranah masyarakat Indonesia merupakan sebuah pondasi. Apabila dikaitkan dengan konsep *Collaborative Governance* tentunya memiliki korelasi secara hakikat. Maka dari itu untuk memberikan gambaran dan pembahasan yang lebih komprehensif peneliti membahas terkait dengan Konsep Collaborative Governance dalam bingkai budaya gotong royong di Indonesia.

Metode

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif. Metode penelitian kualitatif merupakan metode riset yang bersifat deskriptif dan analitis. Hasil penelitian yang ditonjolkan adalah prosesnya. Metode kualitatif ditulis berdasarkan kondisi dan situasi subjek yang diteliti. Sugiyono (2012) berpendapat bahwa penelitian ini dilakukan pada obyek alamiah di mana kehadiran peneliti tidak mempengaruhi dinamika pada obyek tersebut, tetapi dengan menganalisis, memotret dan mengkonstruksi situasi sosial yang diteliti menjadi lebih jelas dan bermakna. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumentasi yang selanjutnya reduksi data dan diargumentasikan melalui gambaran

yang didapat dari data data pendukung seperti jurnal, artikel, laporan laporan lembaga dan buku buku yang berkaitan dengan pembahasan penelitian.

Hasil

Collaborative Governance

Proses penyelenggaraan negara yang melibatkan banyak aktor dalam menyelesaikan masalah politik merupakan suatu keharusan yang dilakukan oleh pemerintah saat ini, mengingat bahwa konsep *governance* itu sendiri meliputi integrasi antara berbagai sektor yang ada dalam suatu negara. **Ansell dan Gash** menjelaskan strategi baru dari pemerintahan yang disebut sebagai pemerintahan kolaborasi atau *collaborative governance*. Bentuk dari *governance* yang melibatkan berbagai *stakeholders* secara bersamaan di dalam sebuah forum dengan aparatur pemerintah untuk membuat keputusan bersama (**Ansell and Alison, 2007:543**).

Sudah seharusnya pemerintah melakukan *collaborative governance* karena yang dituntut adalah bagaimana organisasi pemerintahan hadir tidak sekedar untuk mengikuti tugas-tugas rutin, namun bagaimana ia mengkreasikan nilai bagi masyarakat atau bangsa-bangsa tempatnya berada. Seperti yang dikatakan oleh **Balogh dkk dalam Subarsono (2016: 176)** mendefenisikan *collaborative governance* sebagai Sebuah proses dan struktur dalam manajemen dan perumusan keputusan kebijakan publik yang melibatkan aktor-aktor yang secara konstruktif berasal dari berbagai level, baik dalam tatanan pemerintahan dan atau instansi publik, instansi swasta, dan masyarakat sipil dalam rangka mencapai tujuan publik yang tidak dapat dicapai apabila dilaksanakan oleh satu pihak saja. Menurut **Wanna (2008)** bahwa tahapan *collaborative governance* adalah sebagai berikut:

1. Membangun Visi Bersama (*Shared vision*); Setiap organisasi atau kelompok masyarakat yang mempunyai kepentingan yang sama untuk mencapai tujuan tertentu pasti dilandasi adanya visi yang jelas dan menantang di masa depan.
2. Partisipasi (*Participative*); Keterlibatan stakeholder dalam pengelolaan objek memerlukan adanya struktur yang jelas. Partisipasi aktif merupakan syarat mutlak agar

proses governance dapat berlangsung. Setelah terbangun visi bersama diantara *stakeholder* maka setiap komponen akan melakukan partisipasi sucara sukarela tanpa diperintah.

3. Jejaring (*Network*); Setelah terjadinya partisipasi yang aktif dari *stakeholder* maka diantara *stakeholder* agar terjadi relasi yang baik maka perlu adanya jejaring yang kuat. Jejaring telah diakui secara luas baik oleh akademisi dan praktisi sebagai bentuk penting dari pemerintahan multi-organisasi.
4. Kemitraan (*Partnership*); Fase yang paling tinggi dari kolaboratif adalah terjalinnya kemitraan antara *stakeholder* yang terlibat. Konsep kolaborasi yang menunjukkan adanya skala dan tingkat intensitas maka sebagai kelanjutan dari partisipasi akan memunculkan kemitraan.

Mengacu dari berbagai pengertian yang dijelaskan, dasarnya kebutuhan untuk berkolaborasi muncul dari hubungan saling ketergantungan yang terjalin antar pihak atau antar *stakeholders*. *Collaborative governance* dapat diterangkan sebagai sebuah proses yang melibatkan norma bersama dan interaksi saling menguntungkan antar aktor governance. Melalui perpesktif *collaborative governance*, tujuan-tujuan positif dari masing-masing pihak dapat tercapai. Goldsmith dan Donald (2009:135) juga menyebutkan bahwa terdapat hal penting yang bisa dijadikan kriteria keberhasilan sebuah *network* atau kolaborasi dalam *governance*, yaitu *Networked Structure, Commitment to a Common Purpose, Trust Among The Participants, Governance, Access to Authority, Information Sharing, dan Access to Resources*.

Gotong Royong

Koentjaraningrat (1987) membagi dua jenis gotong royong yang dikenal oleh masyarakat Indonesia; gotong royong tolong menolong dan gotong royong kerja bakti. Kegiatan gotong royong tolong menolong terjadi pada aktivitas pertanian, kegiatan sekitar rumah tangga, kegiatan pesta, kegiatan perayaan, dan pada peristiwa bencana atau kematian. Sedangkan kegiatan gotong royong kerja bakti biasanya dilakukan untuk mengerjakan sesuatu hal yang sifatnya untuk kepentingan umum, yang dibedakan antara gotong royong atas inisiatif warga dengan gotong royong yang dipaksakan.

Konsep gotong royong juga dapat dimaknai dalam konteks pemberdayaan masyarakat Pranadji (2009: 62), karena bisa menjadi modal sosial untuk membentuk kekuatan kelembagaan di tingkat komunitas, masyarakat negara serta masyarakat lintas bangsa dan negara Indonesia dalam mewujudkan kesejahteraan. Hal tersebut juga dikarenakan di dalam gotong royong terkandung makna *collective action to struggle, self governing, common goal, dan sovereignty*. Gotong royong adalah sebuah kebudayaan yang diyakini bahwa meski terjadi perubahan dalam arena kehidupan manusia, gotong royong tetap ada.

Konsep gotong royong yang kita nilai tinggi itu merupakan suatu konsep yang erat sangkut pautnya dengan kehidupan masyarakat Indonesia sebagai petani dalam masyarakat agraris. Di berbagai wilayah telah ada praktik dari gotong royong hanya saja dengan nama dan istilah yang berbeda namun secara hakikat memiliki kesamaan.

Pembahasan

Sejak dahulu gotong royong telah menjadi adat kebiasaan yang mengakar kuat di seluruh penjuru nusantara. Sangat banyak tradisi leluhur yang syarat makna kebersamaan yang hingga kini tak lekang zaman. Dahulu gotong royong identik dengan berbagi tenaga kasar seperti membangun rumah dan membuka lahan pertanian. Seiring berjalannya waktu pola gotong royong di tanah air ikut berkembang dengan munculnya tradisi yang kuat. Gotong royong yang mengakar dalam tradisi nusantara menjadi cikal bakal lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Munculnya gerakan pemuda dengan latar belakang etnis beragam seperti Gerakan Boedi Oetomo pada 1908 dan Kongres Sumpah Pemuda pada 1928 semakin meneguhkan semangat kolaborasi pada masa kolonialisme. Awal abad 20an di Indonesia sebagai disebutnya era kebangkitan nasional, disinilah masyarakat Indonesia membuat suatu organisasi bergotong royong baik bersifat etnis atau kedaerahan. Pada akhirnya terkristalisasi sebuah entitas besar yaitu disebut Bangsa Indonesia. Pandemi Covid-19 melanda Indonesia, fenomena ini telah memporak porandakan seluruh lini kehidupan

manusia. Angka kasus kematian yang tinggi mencapai 104 ribu jiwa dan ekonomi dalam negeri mengalami kekacauan sehingga 29,4 juta pekerja terkena dampaknya. Kondisi ini membuat banyak orang putus asa, meski semua dirundung masa sulit semangat gotong royong senantiasa hadir memberi harapan. Solidaritas sosial yang selama ini menguat merupakan salah satu faktor penopang pada masa krisis.

Nilai-nilai gotong royong yang diduga pudar, ternyata masih ada. Terbukti dari adanya aktifitas spontanitas yang dilakukan sebagian masyarakat di Indonesia manakala ada masalah yang menimpa di lapisan masyarakat kurang beruntung lainnya. Ini adalah potret potensi kepedulian sosial sebagai implementasi gotong royong. Jika gotong royong ternyata ada dan telah berubah wujud, maka sewajarnya menjadi potensi baik bagi bangsa Indonesia bahwa gotong royong masih ada.

Jurnal Junaidi (2016) berpendapat kolaboratif jaringan tidak mungkin untuk tumbuh secara spontan tetapi harus dibudayakan. Sesuatu yang menjadi budaya tentunya menunjukkan kebiasaan yang dilakukan. Kolaboratif tidak bisa dilakukan secara radikal namun perlu ada penetrasi yang memiliki gradasi pada pelaksanaannya. Spontanitas dalam kolaborasi akan menentukan konsistensi pelaksanaan kolaborasi yang dilakukan. Secara empiris maupun gambaran sejarah yang terjadi Indonesia memiliki modal sosial yang berkaitan dengan gotong royong. Modal sosial tersebut merupakan sebuah aset bagi bangsa dalam proses pelaksanaan pembangunan bangsa dan negara.

Indonesia yang memiliki modal sosial gotong royong tentunya tidak memulai dari awal untuk memasuki era *collaborative governance*. Hal tersebut dapat di buktikan dengan peristiwa sejarah yang terjadi di Indonesia begitu mengutamakan gotong royong dalam pelaksanaannya. Tentunya tidak sulit bagi bangsa Indonesia dalam menyesuaikan tatanan pemerintahannya menuju *collaborative governance* dalam bingkai gotong royong.

Collaborative governance melalui pendekatan konseptual terlihat lebih kompleks dalam pelaksanaannya. Namun apabila di telusuri pada setiap prinsip dari suksesnya pelaksanaan *collaborative governance* terdapat nilai-nilai gotong royong didalamnya. untuk

mencapai sebuah penanganan solusi atau dalam bentuk inovasi gotong royong memiliki makna *common goals*. Sama halnya dengan *collaborative governance* berkumpulnya berbagai aktor yang memiliki kepentingan disatukan oleh visi yang sama dalam upaya pencapaian *common goals*. Bahkan secara konsep gotong royong *common goals* bukan faktor utama dalam pelaksanaannya namun rasa kebersamaan dan mengedepankan moralitas menjadi faktor pendorong berjalannya skema gotong royong.

Fase yang paling tinggi dari kolaboratif adalah terjalinnya kemitraan antara *stakeholder* yang terlibat. Konsep kolaborasi yang menunjukkan adanya skala dan tingkat intensitas maka sebagai kelanjutan dari partisipasi akan memunculkan kemitraan. Semangat gotong royong yang dikemas secara rapih dan divisualisasikan melalui skema kerja tata kelola pemerintahan dengan berbagai prinsip-prinsip pemerintahan yang kolaboratif tentunya akan menjadi sebuah langkah yang sempurna khususnya di Indonesia. Bukan hanya dalam satu bidang saja seluruh sektor yang ada pada lingkup kenegaraan bisa dimaksimalkan melalui pemerintahan yang kolaboratif dengan semangat gotong royong yang sudah membudaya.

Tergambarkan bahwa pemerintahan yang kolaboratif bisa tergambarkan melalui nilai-nilai gotong royong yang telah diwariskan oleh para leluhur dan nenek moyang bangsa Indonesia. Menyikapi hal tersebut pemerintahan yang kolaboratif dapat dikatakan sangat cocok bagi para aparatur pemerintahan di Indonesia dalam pelaksanaan tata kelola pemerintahan. *Collaborative governance* yang terlahir dari akademisi dengan konseptual serta pemahaman tentang sosial budaya, secara tidak sadar sebenarnya Indonesia sudah memiliki tradisi tersebut dari sejak lama sebagai kearifan lokalnya yaitu gotong royong.

Gotong royong dalam tata kelola pemerintahan yang melibatkan berbagai pihak guna mencapai kesamaan visi bersama disebut dengan konsep *Collaborative Governance* secara populer. Karena memiliki kesamaan yang erat antara gotong royong dan *collaborative governance* namun dibedakan dengan penyesuaian-penyesuaian hukum, perjanjian dan norma yang berlaku di sebuah negara. *Collaborative governance* memiliki perbedaan secara kontras dengan pelaksanaan gotong royong. *Collaborative governance* memiliki tahapan

dalam pelaksanaannya yaitu diawali dengan mengidentifikasi masalah dan peluang, mendiskusikan dan menyampaikan penanganan sebagai solusi dan membentuk rancangan pelaksanaan kolaboratif. Adanya perbedaan yang dimiliki antara gotong royong dan *collaborative governance* adalah pada tahapannya namun secara hakikat memiliki kesamaan yang erat yaitu *common spirit*.

Kesimpulan

Gotong royong merupakan budaya yang tumbuh dan berkembang dari waktu ke waktu di Indonesia. Perkembangan tersebut menjadi budaya yang erat dalam peradaban di Indonesia, tolong menolong antar sesama manusia yang tergerak secara moral menjadi dasar dari budaya gotong royong. Konsep *Collaborative Governance* merupakan salah satu konsep dalam tata kelola pemerintahan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan didalamnya guna menyelesaikan masalah dan kebutuhan publik. Pada hakikatnya konsep *collaborative governance* memiliki corak yang sama dengan konsep gotong royong.

Collaborative Governance sebagai suatu terobosan dalam tata kelola pemerintahan menjadi solusi karena keterlibatan berbagai pihak didalamnya. Yang perlu di garis bawahi bahwa budaya gotong royong di Indonesia merupakan modal dasar dari pada pelaksanaan konsep *Collaborative Governance*. Gotong royong yang menjadi kebiasaan sehingga membudaya di masyarakat Indonesia tentunya menjadi faktor pendukung bagi pemerintah dalam melaksanakan konsep *collaborative governance*. Di dasari dengan budaya gotong royong masyarakat Indonesia dalam pelaksanaan *collaborative governance* bukan sebuah spontanitas semata dalam menyelesaikan masalah publik dan kebutuhan publik. Sehingga dapat terwujud secara konsisten berdasarkan modal sosial gotong royong dalam rangka sukseksi pelaksanaan *collaborative governance* di Indonesia

Ucapan Terima Kasih

Peneliti mengucapkan terima kasih kepada pihak yang telah mendukung dan membantu dalam memeberikan data maupun informasi untuk tujuan penelitian ini.

Daftar Rujukan

- Ansell, Chris & Gash, Alison. 2009. *Pragmatism and Collaborative Governance, Department of Political Science I, University of California, Berkeley.*
- Chris & Gash, Alison 2007. *Collaborative Governance in Theory and Practice, Journal of Public Administration Research and Theory, JPART*
- Effendi, Tahjuddin Noer. 2013. *Budaya Gotong-Royong Masyarakat dalam Perubahan Sosial Saat Ini.* Jurnal Pemikiran Sosiologi Volume 2 No.1. Universitas Gadjah Mada.
- HAW. Widjaja, 2004, "Otonomi Desa", Rajawali Pers, Jakarta
- Irfan, Maulana. 2017. *Metamorfosis Gotong Royong Dalam Pandangan Konstruksi Sosial.* Prosiding KS: Riset & PKM. Universitas Padjadjaran.
- Junaidi, 2016. Collaborative Governance dalam upaya menyelesaikan krisis listrik di kota Tanjungpinang. Jurnal Universitas Maritim Raja Ali Haji.
- Koentjaraningrat. 1983. *Ciri-Ciri Kehidupan Masyarakat Pedesaan di Indonesia.* Dalam Sajogyo dan Sajogyo, Pudjiwati. Sosiologi Pedesaan. Jilid 1. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
- Kropotkin, Peter. 2006. *Gotong Royong Kunci Kesejahteraan Sosial; Tumbuhnya Darwinisme Sosial.* Piramedia,.Depok
- Kusnaedi. 2006. *Pengertian Gotong Royong.* Jakarta:Rineka Cipta.
- Pranadji, Tri. 2009. *Penguatan Kelembagaan Gotong Royong dalam Perspektif Sosio Budaya Bangsa.* Bogor. Jurnal Forum Penelitian Agro Ekonomi, IPB.Volume 27 No. 1, Juli 2009
- Ratner. 2012. *Collaborative Governance Assessment.* Malaysia: CGIAR.
- Sartono Kartodijjo, 1987, "Gotong - royong: Saling Menolong Dalam Pembangunan Masyarakat Indonesia, dalam Callette, Nat.J dan Kayam, Umar (ed), *Kebudayaan dan Pembangunan: Sebuah Pendekatan Terhadap Antropologi Terapan di Indonesia*, Jakarta, Yaysan Obor.
- Subarsono, AG. 2015. *Kebijakan Publik dan Pemerintahan Kolaboratif Isu-Isu Kontemporer.* Yogyakarta: FISIPOL UGM
- Subarsono. 2016. *Analisis Kebijakan Publik (Konsep, Teori dan Aplikasi).* Cetakan VII. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Subagyo, Agus, et al. *Metode Penelitian Kualitatif.* CV. Aksara Global Akademia, 2023.